

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustine, Oly Viana. Sistem Peradilan Pidana: Suatu Pembaharuan. (Depok: PT Rajagrafindo, Persada), 2019.
- Albana, Muhamad Zaky, Ridha Hakim, Tumbur Palti, Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI), 2018.
- Arikuntoro, Suharsimi. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek. (Jakarta : Rianeka Cipta), 2002.
- Asofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum. (Jakarta : Rineka Cipta), 2001.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. (Jakarta: Kencana), 2016.
- Handayani, Febri. Bantuan Hukum di Indonesia (Yogyakarta: Kalimedia), 2016.
- Harahap, Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan. Cet 11. (Jakarta : Sinar Grafika), 2009.
- Idrus, Muhammad. Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif). (Yogyakarta: UII Press), 2007.
- Ishaq. Pendidikan Keadvokatan. (Jakarta : Sinar Grafika), 2010.
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press), 2020.
- Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro), 1995.

- Nasution, Adnan Buyung. Bantuan Hukum di Indonesia. (Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), 1982.
- Rosyadi, Rahmat dan Sri Hartini. Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif. (Jakarta: Ghalia Indonesia), 2003.
- Ruslan, Rosady. Metode Penelitian. (Jakarta: RajaGrafindo Persada), 2010.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: UI Press), 2014.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat. (Jakarta: Rajawali Pers), 2001.
- Sunaryo, Sidik, Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana. (Malang: UMM Press), 2004.
- Suratman dan Philips Dillah. Metode Penelitian Hukum, Cet 3. (Jakarta: UI Press), 2014.
- Suteki dan Galang Taufani. Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat, Teori dan Praktik, Cet 3. (Depok: Raja Grafindo Persada), 2020.
- Wibowo, Kurniawan Tri, dkk. Etika Profesi dan Bantuan Hukum di Indonesia. (Surabaya: Pustaka Aksara), 2021.
- Widyadharma, IGN Ridwan. Profesional Hukum Dalam Pemberian Bantuan Hukum. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro), 2010.
- Winarta, Frans Hendra. Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), 2009.

_____Advokat Indonesia : citra idealisme, dan keprihatinan. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), 1995.

Jurnal

Akmal Adicahya, "Pengakuan Terhadap Pihak Non-Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum (Politik Hukum Bantuan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia)," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6.3 (2017): 399-420, <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.399-420>.

Angga, dan Ridwan Arifin. "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia". *DIVERSI: Jurnal Hukum* 4.2 (2019): 218-236.

Eleanora, Fransiska Novita, "Bantuan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka." *Lex Jurnalica* 9.3 (2012): 17995, <https://doi.org/10.47007/lj.v9i3.343>.

Komalasari, K., Widyantara, I. M. M., & Widiati, I. A. P. (2019), "Bantuan Hukum Dalam Proses Pradilan Pidana di Indonesia." *Jurnal Analogi Hukum*. 1(3), <https://doi.org/10.22225/ah.1.3.1826.406-410>.

Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan Jhon Rawls," *Jurnal Konstitusi* 6.1 (2009): 143.

Taufik, Ade Irawan, "Sinergisitas Peran dan Tanggung Jawab Advokat dan Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma". *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2.1 (2013): 47-63, <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i1.81>.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman Bab IV Tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan

Umum

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan

Hukum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 tentang

Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana

Bantuan Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian

Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman

Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di

Pengadilan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor

3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga

Bantuan Hukum

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor

10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian
Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Keputusan Direktur Jenderal Peradilan Umum Nomor: 52/DJU/SK/HK.006/5/

Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 1 Tahun 2014 bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan